

**RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TEGALREJO
TAHUN 2019 – 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

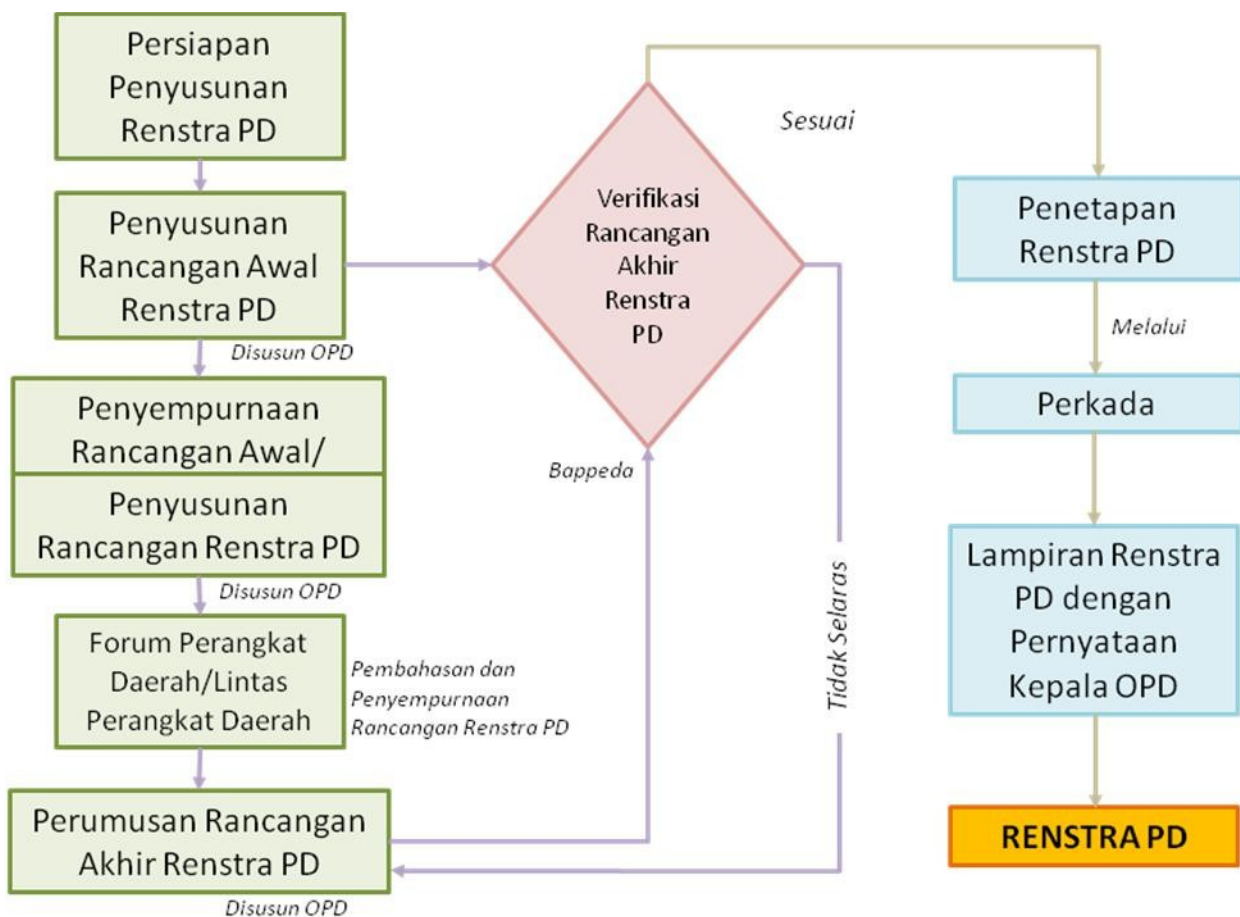
Rencana strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Kesemuanya itu menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di seluruh sub unit kerja pada lingkungan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selama kurun waktu Tahun 2019-2024 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Adapun penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Kecamatan Tegalrejo, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang.

Proses penyusunan Renstra melalui beberapa tahap, yang pertama

analisis gambaran pelayanan dan permasalahan, kemudian menganalisis isu-isu strategis sebagai dasar perumusan tujuan dan sasaran PD berdasarkan sasaran indikator serta target kinerja PD agar Renstra yang disusun sesuai yang diharapkan. Hal ini menjadi sebuah tuntutan utama pada sebuah organisasi untuk memiliki tujuan dan arah organisasi agar dapat memberikan gambaran awal dan tujuan akhir periode waktu tertentu suatu kondisi yang sangat diharapkan. sehingga setiap organisasi publik memiliki tujuan dan sasaran serta upaya pencapaian tujuannya agar hal yang diharapkan dapat terwujud.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Tegalrejo

1.2 Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).

16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
17. Perda RPJMD
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor 66).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019-2024 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah Kecamatan Tegalrejo dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

- 1 Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
- 2 Menjamin konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
- 3 Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu polasikap dan tindakan.
- 4 Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
- 5 Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan.
- 6 Mewujudkan penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran sertamasyarakat, dan
- 7—Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Tegalrejo disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, dan keterkaitan renstra dengan RKT dan Renja.

BAB II GAMBARAN PALAYANAN UMUM SKPD KECAMATAN TEGALREJO

Gambaran Pelayanan SKPD Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang memuat penjelasan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi memuat penjelasan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran sesuai Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih khususnya misi 3.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tegalrejo tahun 2019 – 2024 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang khususnya misi ke 3.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, membahas mengenai penjelasan tentang program-program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai target sesuai indikator yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun secara bertahap serta jumlah dana yang dibutuhkan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

Indikator Kinerja Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Magelang, memuat mengenai indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Tegalrejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Penutup memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan mengenai Renstra Kecamatan Tegalrejo merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tegalrejo, penguatan peran stakeholders dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Tegalrejo dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Camat selaku pimpinan Kecamatan Tegalrejo.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.1.1 Tugas.

Kecamatan dibentuk dalam rangka membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Camat

Camat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/ atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan bertugas Memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang milik daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Subbagian Program dan Keuangan.

Kepala Subbagian Program dan Keuangan memiliki tugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian,

pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Subbagian Administrasi Umum.

Kepala Subbagian Administrasi Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Administrasi Umum yang meliputi penyiapan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan barang milik daerah, penyelenggaraan pelayanan publik serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Kepala Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi persiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

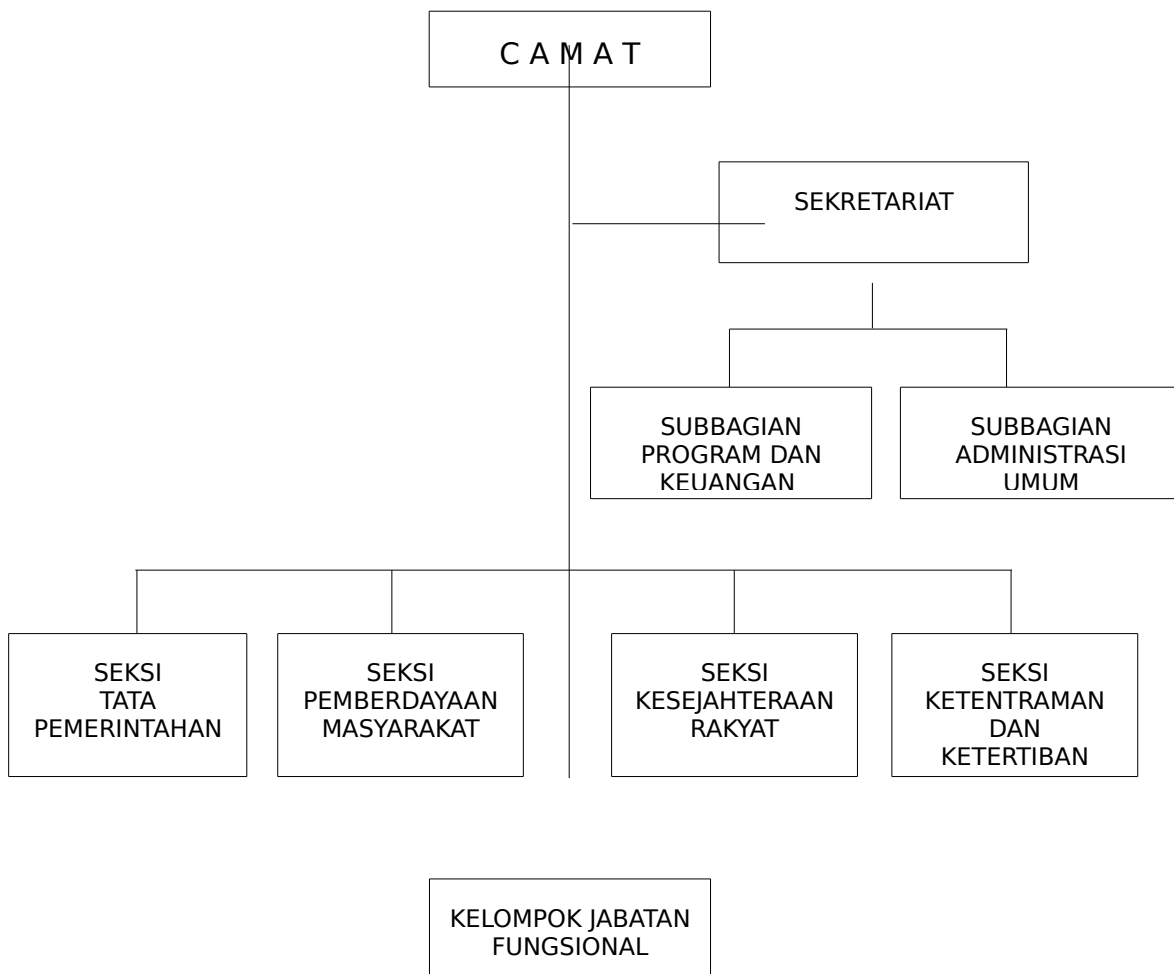
Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum bertugas memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi persiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dengan susunan organisasi kecamatan terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan.
 2. Subbagian Administrasi Umum.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum.
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;

Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Sumberdayaperangkatdaerhsangatberpengaruhdalam pencapaian tujuan organisasi

Jumlah pegawai di Kecamatan Tegalrejo dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial
 sebagaimanatabelberikut:

Tabel 2.1
JumlahPejabat Berdasarkan Eselon

No	Eseloning	L	P	Jumlah
1	Eselon III.a	1	-	1
2	Eselon III.b	1	-	1
3	Eselon IV.a	2	3	4
4	Eselon IV.b	1	1	2

SedangkanKondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkansebagaiberikut:

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkantingkatpendidikan

No	Eseloning	Jumla h	Satuan
1	SD	-	orang
2	SLTP	-	orang
3	SLTA	4	orang
4	D3 / D4	2	orang
5	S1	7	orang
6	S2	-	orang
Jumlah Total		13	orang

KecamatanTegalrejomemiliki asset
 untukmenunjangtugasdanfungsi yang harusdijalankan,
 sebagaimana table di bawahini.

Tabel 2.3

Asset yang Dimiliki Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah	Satuan
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	29.170	m2
		Gedung Kantor	4	unit
		Rumah Dinas	1	unit
2	Alat Angkutan	Mobil	1	unit
		Sepeda Motor	7	unit
3	Alat Studio Komunikasi	HT	1	unit
		Amplifier	2	unit
		Mixer	1	unit
		Speaker corong	2	buah
		Speaker sound	4	buah
		Standmix	4	buah
		Kamera	1	buah
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Filing cabinet	5	buah
		Kursi Rapat Plastik Napoly	50	buah
		Kursi Rapat Chitose	80	buah
		Kursi Rapat Brother 700	40	buah
		Kursi Futura	20	buah

Di Kecamatan Tegalrejo terdapat 21 (duapuluhsatu) desa dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RT	Jumlah Perangkat Desa (minus kepala desa)	Jumlah LK inmas	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tegalrejo	9	27	13	9	
2	Soroyudan	7	19	10	7	

3	Sidorejo	9	35	13	9	
4	Tampingan	10	31	13	10	
5	Banyuurip	5	26	11	5	
6	Purwosari	4	20	9	4	
7	Glagahombo	6	26	10	6	
8	Ngasem	5	13	7	5	
9	Girirejo	7	29	11	7	
10	Purwodadi	3	11	9	3	
11	Wonokerto	3	10	8	3	
12	Dawung	8	22	9	8	
13	Klopo	6	13	10	6	
14	Ngadirejo	5	16	10	5	
15	Donorojo	7	16	13	7	
16	Mangunrejo	6	21	9	6	
17	Japan	8	20	11	8	
18	Kebonagung	9	24	13	9	
19	Sukorejo	6	24	9	6	
20	Banyusari	6	13	10	6	
21	Dlimas	8	22	11	8	
Jumlah		137	438	219	137	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Tegalrejo berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Tegalrejo tahun 2014-2019 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ;

2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Tegalrejo dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain adalah :

- a. Tuntutan layanan Publik yang baik kepada masyarakat.
- b. Tuntutan masyarakat terhadap kebijakan yang memihak kepada kepentingan mereka baik sektor pertanian, industri pengolahan, pertambangan dan galian.
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Tegalrejo menjadi harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- e. Tuntutan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat..
- f. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government) menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
- g. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran.

Peluang yang mendukung kelancaran Kecamatan Tegalrejo dalam pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Tegalrejo dalam kurun waktu lima tahun kedepan antara lain, yaitu:

- a. Terbuka kesempatan bagi Kecamatan dan desa dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat/ stakeholders kepada Kecamatan Tegalrejo
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- d. Koordinasi yang harmonis dengan pemerintah desa
- e. Kemudahan mengakses informasi yang lebih cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi

f. Terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif baik pertanian, pariwisata maupun UMKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Tegalrejo adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan publik kecamatan.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	Belum optimalnya pelayanan publik kecamatan
2	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Belum optimalnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Kecamatan Tegalrejo memiliki tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 yang jika dikaitkan dengan Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan terkait dengan misi ketiga yaitu Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang amanah, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)					
No	Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
1	Misi ke 3 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang amanah.	<ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum b. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati c. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan 	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan	Tugas fungsi yang sudah jelas	Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM
1	Program : Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Peningkatan layanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel, diantaranya melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan layanan publik; b. melanjutkan reformasi birokrasi 		Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan		

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan renstra kecamatan karena renstra kecamatan hanya terkait dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Posisi Kecamatan Tegalrejo ini merupakan kawasan pertanian. Sebagai pendukung pusat pertumbuhan Tegalrejo dengan prioritas sebagai Pusat pemasaran hasil pertanian skala regional (antarkabupaten), nasional (antarprovinsi) dan pusat rest area daerah wisata. Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Tegalrejo dimana Kewajiban Kecamatan turut mewujudkannya adalah sebagai berikut:

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Tegalrejo berdasarkan arahan pengembangan sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

1. Ibukota Kecamatan Tegalrejo sebagai Pengembangan PPK
2. Pusat pertumbuhan Tegalrejo, yang didukung oleh wilayah Kecamatan Tegalrejo, Secang, Candimulyo, Grabag, Pakis dan Ngablak diprioritaskan sebagai pusat penghasil dan pemasaran tanaman sayuran dan bunga, pusat pengembangan peternakan sapi potong dan ayam potong dan pusat penelitian bidang pertanian (Sekolah Tinggi Pertanian di Kecamatan Tegalrejo)
3. Pengembangan Desa Banyuurip sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan banyak pusat kegiatan dengan

prioritas pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah sebagai desa pusat pertumbuhan.

4. Kecamatan Tegalrejo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan PPK dalam sistem perwilayahan, Wilayah Pengembangan sistem perkotaan
5. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah meliputi rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air berupa jaringan air bersih dan irigasi.

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang wilayah Kecamatan Tegalrejo meliputi:

1. Kawasan Lindung, meliputi
 - a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumberdaya alam seperti tanah, air, iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa. Proporsi Kecamatan Tegalrejo sebagai kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 3,68 hektar
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai.
 - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sekitar mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
2. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan bencana longsor.
3. Kawasan budidaya meliputi
 - a. Kawasan hutan rakyat seluas kurang lebih 3,68 Hektar;
 - b. Kawasan pertanian seluas kurang lebih 1.782, 13 Hektar;

Untuk KLHS Pilar hukum dan tata kelola kelembagaan ini hanya mencakup satu tujuan yaitu tujuan 16 yaitu perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh. Khusus pilar hukum dan tata kelola ini tidak memiliki atau tidak terkait langsung dengan isu strategis yang dihasilkan dari kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Magelang.

Hal ini dapat diperjelas dengan tabel di bawah ini

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW dan KLHS	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	RTRW				
A	Pola Ruang RTRW 1. Kawasan Lindung 2. Kawasan budidaya	1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 2. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan 2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Ada petugas yang menangani	Masyarakat tidak memahami perda tata ruang
B	Struktur Ruang RTRW 1. Ibukota Kecamatan Tegalrejo sebagai Pengembangan PPK 2. Pusat pertumbuhan Tegalrejo 3. Pengembangan Desa Banyuurip sebagai desa pusat pertumbuhan	pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;		Tersedia mekanisme perencanaan pembangunan Keterbatasan sumber daya	1.
II	KLHS				
A	Permasalahan dan Isu Strategis Indeks reformasi birokrasi dan kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik.				
B	Skenario dan Rekomendasi		1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kepada masyarakat yang harus disediakan oleh kecamatan 2. Belum optimalnya koordinasi	Tersedianya regulasi dan personil yang menangani	Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas
	Skenario: 1. secara substansi mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk 2. Menjamin akses publik terhadap informasi dan	1. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 2. Pembinaan dan pengawasan			

<p>melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional</p> <p>Rekomendasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan indeks perilaku anti korupsi 2. meningkatkan jumlah sertifikat PPID untuk meningkatkan kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsinya 	<p>penyelenggaraan pembinaan desa dana tau kelurahan</p>	<p>penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan</p>		
---	--	--	--	--

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

Saat ini pelayanan publik dirasakan belum karena masih munculnya keluhan dari masyarakat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk pelayanan dikecamatan.

Permasalahan atau isu strategis di tingkat kecamatan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan dan
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Hal ini apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Magelang, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tegalrejo adalah :

1. Keterbatasan sarana prasarana, Prosedur, dan SDM sehingga layanan publik masih perlu ditingkatkan
2. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan

3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
4. RTRW akan memberikan kepastian hukum bagi semua stakeholders.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tegalrejo 5 (lima) tahun ke depan termuat dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik		Indek Kepuasan Masyarakat	82,01	82,74	84,23	85,71	87,19	88,68	90,16	90,16
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Nilai Survey Kepuasan masyarakat.	82	84	86	88	90	92	94	94
		Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	100	100	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tegalrejo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tegalrejo tahun 2019 – 2024 sesuai dengan misi Kabupaten Magelang disajikan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera berdaya saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan layanan terhadap masyarakat	1. Meningkatkan layanan publik kecamatan.
	2. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Urusan Wajib dan urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, untuk OPD Kecamatan Tegalrejo akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana Tabel 6.1 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tegalrejo. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Tabel 7.1

**Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kec.Tegalrejo
Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Survey Kepuasan masyarakat.	(total nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang	82	84	86	88	90	92	94	94
2	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)*100 persen) + (Jumlah desa tertib administrasi /jumlah desa)*100 persen)/2	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Formula	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1	Prosentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	(total nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi)*Nilai Penimbang	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase kegiatan yang dikoordinasikan dan persentase desa yang tertib administrasi	((Jumlah urusan yang dilaksanakan/jumlah urusan yang seharusnya dilaksanakan)* 100 persen) + (Jumlah desa tertib administrasi /jumlah desa)*100 persen)/2	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang lebih konkrit akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo serta KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 2019-2024 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya untuk memenuhi amanat perundang-undangan, bahwa Renstra Kecamatan Tegalrejo memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Tegalrejo, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2024. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025) yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diharapkan pada tahun 2024 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra untuk masa lima tahun selanjutnya. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya selesai sampai dengan tahun 2024 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung pendanaan atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Tegalrejo, Juni 2019

CAMAT TEGALREJO

MUHTASOR, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 196610061986071001

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				
***)	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,662,000	2,500,000	3,500,000	3,000,000	3,050,000
Hasil Retribusi Daerah	3,662,000	2,500,000	3,500,000	3,000,000	3,050,000
BELANJA	1,866,332,500	2,016,194,000	1,846,213,600	2,027,207,000	2,152,017,500
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,502,844,000	1,661,629,000	1,460,802,000	1,605,187,000	1,694,685,000
Belanja Pegawai	1,502,844,000	1,661,629,000	1,460,802,000	1,605,187,000	1,694,685,000
BELANJA LANGSUNG	363,488,500	354,565,000	385,411,600	422,020,000	457,332,500
Belanja Pegawai	39,195,000	42,730,000	39,987,000	47,318,000	99,380,000
Belanja Barang dan Jasa	256,738,000	248,769,125	280,264,600	316,482,000	307,452,500
Belanja Modal	67,555,500	63,065,875	65,160,000	58,220,000	50,500,000
Realisasi per Program					

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	38,220,000	41,020,000	67,406,000	59,470,000	77,500,000
Program Peningkatan sarana prasarana aparatur	214,273,500	198,108,000	154,240,000	171,555,000	129,436,000
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				
***)	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4,000,000	3,000,000	0	3,356,000	5,000,000
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	43,925,000	28,490,000	10,336,000	10,336,000	27,000,000
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	7,000,000	23,447,000	9,500,000	9,500,000	18,500,000
Program pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa	0	0	0	2,500,000	12,580,000

Program Penataan Peraturan perundang-undangan	2,000,000	0	0	0	0
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	4,000,000	4,000,000	17,750,000	21,750,000	21,000,000
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	0	0	7,500,000	12,300,000	15,000,000
Program Penataan Administrasi Kependudukan	3,000,000	3,000,000	0	0	0
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	0	0	25,673,500	39,673,500	20,000,000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	31,070,000	37,500,000	17,350,000	23,919,000	25,000,000
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				
***)	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	12,000,000	8,000,000	7,165,000	9,933,000	15,000,000
Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	0	0	2,000,000	2,550,000	0

Program Pengembangan Lingkungan Sehat	2,000,000	0	0	0	0
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	0	0	5,240,000	3,670,000	0
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	0	3,000,000	7,040,000	7,020,000	0
Program Peningkatan Kehidupan Sosial/Keagamaan	0	0	38,538,600	30,319,500	43,316,500
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	0	0	7,506,000	8,851,000	10,000,000
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	2,000,000	0	0	0	0
Program peningkatan keberdayaan masyarakat membangun desa	0	5,000,000	8,166,500	0	5,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	0	0	0	5,317,000	0
Program Pemeliharaan Kantamtibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	0	0	0	0	18,000,000
Program Perencanaan Sosial dan Budaya	0	0	0	0	15,000,000

363,492,528

354,569,030

385,415,632

422,024,034

457,336,536

(4,030)

Tabel T-C.24.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tegalrejo
 Kabupaten Magelang

Realisasi Anggaran pada					Rasio	
Tahun ke-					An	
2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3,540,000	2,809,500	3,635,200	4,352,000	2,550,775	0.97	1.12
3,540,000	2,809,500	3,635,200	4,352,000	2,550,775	0.97	1.12
1,574,521,434	1,699,356,895	1,615,548,228	1,622,580,835	1,619,766,574	0.88	0.90
1,228,630,608	1,375,834,581	1,271,046,697	1,248,936,096	1,195,200,451	0.82	0.83
1,228,630,608	1,375,834,581	1,271,046,697	1,248,936,096	1,195,200,451	0.82	0.83
345,890,826	323,522,314	344,501,531	373,644,739	424,566,123	0.95	0.97
36,122,000	33,315,000	38,182,000	43,820,000	99,030,000	0.92	0.78
243,724,826	290,207,314	243,336,036	273,766,539	280,925,423	0.95	1.17
66,044,000	0	62,983,495	56,058,200	44,610,700	0.98	0.00

36,786,976	36,884,860	60,813,108	54,590,816	75,723,012	0.96	0.90
202,761,550	183,720,154	123,904,548	132,550,173	102,805,486	0.95	0.93
Realisasi Anggaran pada					Rasio	
Tahun ke-					An	
2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3,979,900	2,999,850	0	3,356,000	4,999,925	0.99	1.00
42,301,800	28,490,000	10,335,900	10,335,900	26,999,900	0.96	1.00
6,999,900	23,446,850	9,499,450	9,472,350	18,478,300	1.00	1.00
0	0	0	2,499,950	12,579,400	0.00	0.00

2,000,000	0	0	0	0	1.00	0.00
3,999,900	4,000,000	17,600,000	21,749,950	20,999,600	1.00	1.00
0	0	7,499,950	12,300,000	14,999,800	0.00	0.00
2,960,000	2,960,000	0	0	0	0.99	0.99
0	0	25,310,900	35,310,450	16,490,000	0.00	0.00
28,665,000	25,488,950	16,349,400	23,888,850	24,999,800	0.92	0.68
Realisasi Anggaran pada					Rasio	
Tahun ke-					An	
2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
11,596,800	8,000,000	7,164,900	9,933,000	14,850,000	0.97	1.00
0	0	1,999,975	2,489,950	0	0.00	0.00

1,840,000	0	0	0	0	0.92	0.00
0	0	4,038,900	3,669,800	0	0.00	0.00
0	2,999,900	7,033,900	7,019,950	0	0.00	1.00
0	0	37,278,450	30,318,850	43,316,200	0.00	0.00
0	0	7,505,900	8,841,900	9,999,900	0.00	0.00
1,999,000	0	0	0	0	1.00	0.00
0	4,531,750	8,166,250	0	4,999,800	0.00	0.91

0	0	0	5,316,850	0	0.00	0.00
0	0	0	0	18,000,000	0.00	0.00
0	0	0	0	14,325,000	0.00	0.00

345,894,854

323,526,344

344,505,563

373,648,773

424,570,159

antara Realisasi dan			Rata-rata	
anggaran Tahun ke-			Pertumbuhan	
2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.04	1.45	0.84	-0.01	-0.03
1.04	1.45	0.84	-0.01	-0.03
0.90	0.85	0.82	0.04	0.01
0.87	0.78	0.71	0.03	0.00
0.87	0.78	0.71	0.03	0.00
0.93	0.92	0.93	0.06	0.06
0.95	0.93	1.00	0.33	0.37
0.87	0.87	0.91	0.05	0.05
0.97	0.96	0.88	-0.07	-0.33

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran			
2014	2015	2016	2017
(12)	(13)	(14)	(15)
	-0.32	0.40	-0.14
	-0.32	0.40	-0.14
	0.08	-0.08	0.10
	0.11	-0.12	0.10
	0.11	-0.12	0.10
	-0.02	0.09	0.09
	0.09	-0.06	0.18
	-0.03	0.13	0.13
	-0.07	0.03	-0.11

0.90	0.92	0.98	0.23	0.23
0.80	0.77	0.79	-0.11	-0.14
antara Realisasi dan			Rata-rata	
anggaran Tahun ke-			Pertumbuhan	
2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
0.00	1.00	1.00	-0.19	-0.19
1.00	1.00	1.00	0.16	0.16
1.00	1.00	1.00	0.68	0.68
0.00	1.00	1.00	1.01	1.01

	0.07	0.64	-0.12
	-0.08	-0.22	0.11
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran			
2014	2015	2016	2017
(12)	(13)	(14)	(15)
	-0.25	-1.00	0.00
	-0.35	-0.64	0.00
	2.35	-0.59	0.00
	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
0.99	1.00	1.00	0.91	0.90
1.00	1.00	1.00	0.21	0.21
0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
0.99	0.89	0.82	0.01	-0.03
0.94	1.00	1.00	0.02	0.01
antara Realisasi dan			Rata-rata	
anggaran Tahun ke-			Pertumbuhan	
2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.00	1.00	0.99	0.11	0.12
1.00	0.98	0.00	-0.18	-0.19

	-1.00	0.00	0.00
	0.00	3.44	0.23
	0.00	0.00	0.64
	0.00	-1.00	0.00
	0.00	0.00	0.55
	0.21	-0.54	0.38
Rata-rata Pertumbuhan Anggaran			
2014	2015	2016	2017
(12)	(13)	(14)	(15)
	-0.33	-0.10	0.39
	0.00	0.00	0.28

0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
0.77	1.00	0.00	-0.32	-0.27
1.00	1.00	0.00	0.09	0.09
0.97	1.00	1.00	0.05	0.06
1.00	1.00	1.00	0.08	0.08
0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.25
1.00	0.00	1.00	-0.09	-0.05

	-1.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	-0.30
	0.00	1.35	0.00
	0.00	0.00	-0.21
	0.00	0.00	0.18
	-1.00	0.00	0.00
	0.00	0.63	-1.00

0.00	1.00	0.00	-0.25	-0.25
0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.96	0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00

	Rata-rata
2018	
(16)	
0.02	-0.01
0.02	-0.01
0.06	0.04
0.06	0.03
0.06	0.03
0.08	0.06
1.10	0.33
-0.03	0.05
-0.13	-0.07

Rata-rata Pertumbuhan realisasi						
					Rata-rata	
2014	2015	2016	2017	2018		
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	-0.21	0.29	0.20	-0.41	-0.03	
	-0.21	0.29	0.20	-0.41	-0.03	
	0.08	-0.05	0.00	0.00	0.01	
	0.12	-0.08	-0.02	-0.04	0.00	
	0.12	-0.08	-0.02	-0.04	0.00	
	-0.06	0.06	0.08	0.14	0.06	
	-0.08	0.15	0.15	1.26	0.37	
	0.19	-0.16	0.13	0.03	0.05	
	-1.00	0.00	-0.11	-0.20	-0.33	

0.30	0.23
-0.25	-0.11
2018	Rata-rata
(16)	
0.49	-0.19
1.61	0.16
0.95	0.68
4.03	1.01

	0.00	0.65	-0.10	0.39	0.23	
	-0.09	-0.33	0.07	-0.22	-0.14	
	Rata-rata Pertumbuhan realisasi					
					Rata-rata	
	2014	2015	2016	2017	2018	
	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
		-0.25	-1.00	0.00	0.49	-0.19
		-0.33	-0.64	0.00	1.61	0.16
		2.35	-0.59	0.00	0.95	0.68
		0.00	0.00	0.00	4.03	1.01

0.00	-0.25
-0.03	0.91
0.22	0.21
0.00	-0.25
-0.50	0.01
0.05	0.02
2018	Rata-rata
(16)	
0.51	0.11
-1.00	-0.18

	-1.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	
	0.00	3.40	0.24	-0.03	0.90	
	0.00	0.00	0.64	0.22	0.21	
	0.00	-1.00	0.00	0.00	-0.25	
	0.00	0.00	0.40	-0.53	-0.03	
	-0.11	-0.36	0.46	0.05	0.01	
	Rata-rata Pertumbuhan realisasi					
					Rata-rata	
2014	2015	2016	2017	2018		
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
	-0.31	-0.10	0.39	0.50	0.12	
	0.00	0.00	0.24	-1.00	-0.19	

0.00	-0.25
-1.00	-0.32
-1.00	0.09
0.43	0.05
0.13	0.08
0.00	-0.25
0.00	-0.09

	-1.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	
	0.00	0.00	-0.09	-1.00	-0.27	
	0.00	1.34	0.00	-1.00	0.09	
	0.00	0.00	-0.19	0.43	0.06	
	0.00	0.00	0.18	0.13	0.08	
	-1.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	
	0.00	0.80	-1.00	0.00	-0.05	

-1.00	-0.25
0.00	0.00
0.00	0.00

	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.25	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indikator Tujuan 1 Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN		
	Indikator Sasaran 1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		
	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		
	Cakupan pelaporan keuangan dan kinerja		
	Cakupan realisasi pelunasan PBB		
	Cakupan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan		
	Cakupan Desa yang difasilitasi		
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Indikator Tujuan 2 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat		
	Indikator Sasaran 2 Cakupan pelayanan PATEN		
3	Indikator Tujuan 3		

	Mewujudkan peningkatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi		
	Indikator sasaran 3 Terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat		
	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan		
	Cakupan kegiatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		
	Cakupan kader Kesehatan di 15 Desa		
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Indikator Tujuan 4 Mengembangkan potensi sumber daya, perencanaan dan pemberdayaan		
	Indikator Sasaran 4 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		

	Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun Desa		

Tahap
Pencapaian Kinerja Perencanaan
Kabupaten

Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			
	2014	2015	2016	2017
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	100	100	100	100
	100	100	100	100
	100	100	100	100
	100	100	100	100
	100	100	100	100
	100	100	100	100
	100	100	100	100
Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			
	2014	2015	2016	2017
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	100	100	100	100

	100	100	100	100
	100	100	100	100
	100	100	100	100
	100	100	100	100
	100	100	100	100
Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun			
	2014	2015	2016	2017
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	100	100	100	100

	100	100	100	100
--	-----	-----	-----	-----

Rata-rata Rasio Capaian

Del T-C.23.

Layanan Kecamatan Tegalrejo
Kecamatan Magelang

	Realisasi Capaian Tahun			
2018	2014	2015	2016	2017
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
	Realisasi Capaian Tahun			
2018	2014	2015	2016	2017
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
100	100	100	100	100

100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
100	100	100	100	100
	Realisasi Capaian Tahun			
2018	2014	2015	2016	2017
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
100	100	100	100	100

100	100	100	100	100
-----	-----	-----	-----	-----

	Rasio Capaian pada Tahun				
2018	2014	2015	2016	2017	2018
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Rasio Capaian pada Tahun				
2018	2014	2015	2016	2017	2018
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Rasio Capaian pada Tahun				
2018	2014	2015	2016	2017	2018
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

100	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	252.63	252.75	252.88	253.00	253.13

252.875

76.652

0.8099623783

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TEGALREJO
KABUPATEN MAGELANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,01 angka (0-100)	82,74 angka (0-100)	84,23 angka (0-100)	680.250.000	85,71 angka (0-100)	645.250.000	87,19 angka (0-100)	635.250.000	88,68 angka (0-100)	635.250.000	90,16 angka (0-100)	1.380.250.000	90,16 angka (0-100)	3.976.250.000		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan			Nilai survei kepuasan masyarakat kecamatan	82 angka (0-100)	84 angka (0-100)	86 angka (0-100)	450.250.000	88 angka (0-100)	415.250.000	90 angka (0-100)	405.250.000	92 angka (0-100)	405.250.000	94 angka (0-100)	430.250.000	94 angka (0-100)	2.106.250.000		
		4.1.4.1.23.1.7	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	0 %	0 %	100 %	375.000.000	100 %	340.000.000	100 %	330.000.000	100 %	330.000.000	100 %	355.000.000	100 %	1.730.000.000		
		4.1.4.1.23.1.7.1	Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	1. Jumlah Surat yang dikelola	0 surat	0 surat	6000 surat	7.500.000	6000 surat	7.500.000	6000 surat	7.500.000	6000 surat	7.500.000	6000 surat	7.500.000	30000 surat	37.500.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah arsip yang dikelola	0 arsip	0 arsip	1300 arsip		1300 arsip		1300 arsip		1300 arsip		1300 arsip		6500 arsip			
				3. Jumlah bahan pustaka yang dikelola	0 buku	0 buku	243 buku		243 buku		243 buku		245 buku		250 buku		1224 buku			
		4.1.4.1.23.1.7.2	Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	0 kali rapat	0 kali rapat	25 kali rapat	40.000.000	25 kali rapat	40.000.000	25 kali rapat	40.000.000	25 kali rapat	40.000.000	25 kali rapat	40.000.000	125 kali rapat	200.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	0 kali	0 kali	150 kali		150 kali		150 kali		150 kali		150 kali		750 kali			
				3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	0 layanan	12 layanan	12 layanan		12 layanan		12 layanan		12 layanan		12 layanan		60 layanan			
		4.1.4.1.23.1.7.3	Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	0 paket	0 paket	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	5 paket	250.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	0 paket	0 paket	1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		5 paket			
				3. Jumlah aset yang dikelola	na unit	na unit	400 unit		400 unit		400 unit		400 unit		400 unit		2000 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.1.4.1.23.1.7.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	0 m2	0 m2	1148 m2	110.000.000	1148 m2	110.000.000	1148 m2	110.000.000	1148 m2	110.000.000	1148 m2	110.000.000	1148 m2	550.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. jumlah rekening/bulan yang dibayar dalam 1 tahun	0 rekening	0 rekening	60 rekening		60 rekening		60 rekening		60 rekening		60 rekening		300 rekening			
		4.1.4.1.23.1.7.5	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	1. Jumlah peralatan yang dipelihara	0 unit	0 unit	26 unit	90.000.000	26 unit	90.000.000	26 unit	90.000.000	26 unit	90.000.000	26 unit	90.000.000	130 unit	450.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. jumlah perlengkapan yang dipelihara	0 unit	0 unit	11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		11 unit		55 unit			
				3. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	0 unit	0 unit	1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit			
				4. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	0 unit	0 unit	7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit		7 unit			
		4.1.4.1.23.1.7.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	0 Paket	0 Paket	2 Paket	70.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	25.000.000	1 Paket	25.000.000	0 Paket	50.000.000	5 Paket	205.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
		4.1.4.1.23.1.7.7	Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	1. Frekuensi pembinaan ASN	0 kali	0 kali	12 kali	7.500.000	12 kali	7.500.000	12 kali	7.500.000	12 kali	7.500.000	12 kali	7.500.000	60 kali	37.500.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah ASN yang terfasilitasi penilaian kerjanya	0 orang	0 orang	23 orang		25 orang		25 orang		25 orang		27 orang		152 orang			
				3. Jumlah JFT yang terfasilitasi penilaian angka kreditnya	na orang	na orang	1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		5 orang			
		4.1.4.1.23.1.8	Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah	0 %	0 %	100 %	40.250.000	100 %	40.250.000	100 %	40.250.000	100 %	40.250.000	100 %	40.250.000	100 %	201.250.000		
		4.1.4.1.23.1.8.1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1. Jumlah kegiatan yang dikelola	0 Kegiatan	0 Kegiatan	16 Kegiatan	25.250.000	16 Kegiatan	25.250.000	16 Kegiatan	25.250.000	16 Kegiatan	25.250.000	16 Kegiatan	25.250.000	90 Kegiatan	126.250.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah laporan keuangan yang tersusun	0 laporan	0 laporan	6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		6 laporan		30 laporan			
		4.1.4.1.23.1.8.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	0 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	5.000.000	0 dokumen	5.000.000	0 dokumen	5.000.000	0 dokumen	5.000.000	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	25.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.				
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		10 dokumen			
				3. jumlah dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	na dokumen	na dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				4. Jumlah dokumen RPTK yang tersusun	na dokumen	na dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		4.1.4.1.23.1.8.3	Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen pelaporan tahunan yang tersusun	0 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.000.000	20 Dokumen	25.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan tribulanan yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		40 dokumen			
				3. Jumlah dokumen pelaporan bulanan yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		60 dokumen			
				4. Jumlah dokumen evaluasi jangka menengah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen			
		4.1.4.1.23.1.8.4	Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	1. Jumlah Standar Operasional Prosedur yang tersusun	0 buah	0 buah	10 buah	5.000.000	10 buah	5.000.000	10 buah	5.000.000	10 buah	5.000.000	10 buah	5.000.000	10 buah	5.000.000	50 buah	25.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah Standar Pelayanan yang tersusun	0 buah	0 buah	10 buah		10 buah		10 buah		10 buah		10 buah		10 buah		50 buah			
				3. Jumlah Daftar Informasi Publik	0 dokumen	0 dokumen	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		50 dokumen			
				4. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
				5. Jumlah dokumen pengendalian intern (SIPP) yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		5 dokumen			
		4.1.4.1.23.1.4.2	Program Pelayanan Publik Kecamatan	Presentase Pelayanan Publik Sesuai SOP dan SP	0 %	0 %	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	35.000.000	100 %	175.000.000		
		4.1.4.1.23.1.4.2.1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen terlayani	0 dokumen	0 dokumen	6000 dokumen	35.000.000	6000 dokumen	35.000.000	6000 dokumen	35.000.000	6000 dokumen	35.000.000	6000 dokumen	35.000.000	6000 dokumen	35.000.000	30000 dokumen	175.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan			Presentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	100 %	100 %	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	950.000.000	100 %	1.870.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.1.4.1.23.1.43	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Presentase kegiatan yang dikoordinasikan dan presentase desa yang tertib administrasi	0 %	0 %	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	230.000.000	100 %	950.000.000	100 %	1.870.000.000		
		4.1.4.1.23.1.43.1	Peningkatan Tata Kelola Kecamatan Pemerintahan Desa/Kelurahan	1. Jumlah desa terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	0 desa	0 desa	21 desa	70.000.000	21 desa	70.000.000	21 desa	70.000.000	21 desa	70.000.000	21 desa	70.000.000	21 desa	350.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah Kepala Desa yang terpilih	0 orang	0 orang	0 orang		0 orang		1 orang		0 orang		3 orang		4 orang			
				3. Jumlah perangkat desa terisi	0 orang	0 orang	3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		3 orang		15 orang			
				4. Jumlah desa lunas PBB	0 desa	0 desa	21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa			
				5. Jumlah Perangkat Desa yang terbina	na orang	na orang	242 orang		242 orang		242 orang		242 orang		242 orang		1210 orang			
				6. Jumlah anggota BPD yang terbina	na orang	na orang	141 orang		141 orang		141 orang		141 orang		141 orang		705 orang			
				7. Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa	na desa	na desa	21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa			
		4.1.4.1.23.1.43.2	Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	1. Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	21 dokumen	40.000.000	21 dokumen	40.000.000	21 dokumen	40.000.000	21 dokumen	40.000.000	21 dokumen	40.000.000	105 dokumen	200.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	0 desa	0 desa	21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa			
				3. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	0 dokumen	0 dokumen	21 dokumen		21 dokumen		21 dokumen		21 dokumen		21 dokumen		105 dokumen			
				4. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang terbina	0 lembaga desa	0 lembaga desa	21 lembaga desa		21 lembaga desa		21 lembaga desa		21 lembaga desa		21 lembaga desa		105 lembaga desa			
				5. Jumlah peserta musrenbangkec	na orang	na orang	145 orang		145 orang		145 orang		145 orang		145 orang		725 orang			
				6. Jumlah desa yang terfasilitasi evaluasi perkembangan desa	na desa	na desa	21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa			
		4.1.4.1.23.1.43.3	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	1. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinan	0 desa	0 desa	21 desa	80.000.000	21 desa	80.000.000	21 desa	80.000.000	21 desa	80.000.000	21 desa	800.000.000	21 desa	1.120.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah TP PKK Desa yang dibina	0 TP PKK Desa	0 TP PKK Desa	21 TP PKK Desa		21 TP PKK Desa		21 TP PKK Desa		21 TP PKK Desa		21 TP PKK Desa		21 TP PKK Desa			
				3. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan	0 peserta	0 peserta	215 peserta		215 peserta		215 peserta		215 peserta		215 peserta		1075 peserta			
				4. Jumlah desa layak anak	0 desa	0 desa	1 desa		1 desa		1 desa		1 desa		1 desa		5 desa			
				5. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	0 kegiatan	0 kegiatan	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan		5 kegiatan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2018	2019	2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp.		
					Target	Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4.1.4.1.23.1.43.4	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Wawasan Kebangsaan	1. Jumlah satuan linmas desa yang terbina	0 desa	0 desa	21 desa	40.000.000	21 desa	40.000.000	21 desa	40.000.000	21 desa	40.000.000	21 desa	40.000.000	21 desa	200.000.000	KECAMATAN TEGALREJO	KECAMATAN TEGALREJO
				2. Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	0 peraturan	0 peraturan	1 peraturan		1 peraturan		1 peraturan		1 peraturan		1 peraturan		5 peraturan			
				3. Jumlah frekuensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	0 kali	0 kali	12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		12 kali		60 kali			
				4. Jumlah desa yang difasilitasi penanggulangan bencana	0 desa	0 desa	21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa		21 desa			
				5. Jumlah paskibraka yang terbina	0 orang	0 orang	72 orang		72 orang		72 orang		72 orang		72 orang		360 orang			
Jumlah								680.250.000		645.250.000		635.250.000		635.250.000		1.380.250.000		3.976.250.000		

BAB VIII


PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 yang disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap komponen stakeholder. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang lebih konkrit akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Kecamatan Tegalrejo serta KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang 2019-2024 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya untuk memenuhi amanat perundang-undangan, bahwa Renstra Kecamatan Tegalrejo memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Tegalrejo, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2024. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan di Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang Tahun 2024 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025) yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 diharapkan pada tahun 2024 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra untuk masa lima tahun selanjutnya. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya selesai sampai dengan tahun 2024 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi pada tahun 2025. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung pendanaan atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Tegalrejo, Juni 2019


GAMAT TEGALREJO
MUHITASOR, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 196610061986071001